

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR  
(STUDI PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2014  
DI KELURAHAN PONDOK PINANG KECAMATAN KEBAYORAN LAMA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN)**

**Dede Saidah**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
**dedesaidah@pps.ipdn.ac.id**

**ABSTRACT**

*Various policies have been implemented by the government and local government in disaster relief process through the utilization of resources with the support of the implementing agencies and public, but have not been able to achieve maximum results as expected. It reflected from lack of duties and functions government bureaucracy as policy implementers in performing flood disaster relief.*

*This study aims to describe how the implementation of flood disaster relief policies held in the Administrative Village Pondok Pinang in District of Kebayoran Lama, South Jakarta.*

*The method used in this research is descriptive qualitative approach, the technique of data collection is through interviews, observation and documents. This study focused on the implementation of flood disaster relief policy. By using the Jones opinion factors include the organization, interpretation and application focus the determinants of policy and how the implementation of the policies implemented. SWOT analysis and Litmust Test used to analyze flood disaster relief policy implementation.*

*The results showed that the implementation of flood disaster management policies in Pondok Pinang Village was not optimally implemented. Some of the obstacles encountered in policy implementation were due to the lack of capacity and commitment of the implementing apparatus as well as the lack of guidance and counseling carried out, which resulted in a lack of support and community participation in the success of the implemented policies. The results of the SWOT analysis are very strategic and strategic, namely 1) Maximizing the use of available personnel and budget resources in implementing flood prevention policies in order to provide quality services to the community. 2) Increase public awareness to participate in the success of the policy through socialization, guidance and counseling.*

**Keywords:** Policy Implementation, Disaster Flood Relief

**ABSTRAK**

Berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses penanggulangan bencana melalui pemanfaatan sumber daya pelaksana dengan dukungan instansi terkait dan masyarakat, namun belum mampu

mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Hal itu dapat dilihat dari masih sulitnya birokrasi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi seperti halnya dalam penanggulangan bencana banjir sehingga pelayanan publik belum dapat dilaksanakan secara berkualitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir yang diselenggarakan di Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir, yang menyoroti bagaimana implementasi kebijakan dilaksanakan, dan faktor-faktor penentu implementasi kebijakan dengan menggunakan pendapat Jones yang meliputi faktor organisasi, interpretasi dan aplikasi. Sementara strategi yang digunakan dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir, menggunakan analisis SWOT dan Litmust Test.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pondok Pinang belum terselenggara secara optimal. Beberapa kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan disebabkan karena, kurangnya kemampuan dan komitmen aparat pelaksana serta kurangnya pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan, sehingga memberi dampak terhadap kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan kebijakan yang dilaksanakan. Hasil analisis SWOT terdapat hal yang sangat strategis dan strategis yaitu 1) Memaksimalkan penggunaan sumber daya aparatur dan anggaran yang tersedia dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir guna memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan melalui sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Bencana Banjir.

## PENDAHULUAN

Salah satu peristiwa alam yang merugikan manusia dan sering terjadi di Indonesia serta dapat dikategorikan sebagai bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Tidak dapat dipungkiri Indonesia merupakan sebuah negara yang teridentifikasi sebagai rawan bencana karena dalam beberapa tahun terakhir ini, bencana memang sering terjadi, mulai dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun bencana karena kesalahan manusia (*human error*). Kesalahan manusia yang menyebabkan bencana seringkali tidak disadari, hal ini karena kultur pembangunan di Indonesia yang hanya *business oriented* tanpa memperhatikan aspek lingkungan (*sustainable development*). Bencana akibat kesalahan manusia yang sering

terjadi di Indonesia adalah bencana banjir.

Banjir merupakan bencana yang sudah menjadi "langganan" bagi beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan, di ibu kota Jakarta setiap tahun terjadi bencana ini. Selain disebabkan oleh faktor alam, banjir juga disebabkan oleh manusia. Pembangunan gedung, penebangan pohon, dan penyempitan sungai merupakan contoh ulah manusia yang menjadi penyebab banjir. Kerugian secara materil akibat banjir dapat mengganggu seluruh aktivitas masyarakat maupun menjadi penghambat pertumbuhan kota. Banjir besar yang melanda Jakarta di awal 2013, melumpuhkan mayoritas sendi kehidupan dan dunia usaha. Kerugian materi yang besar, tidak terhindarkan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memperkirakan, kerugian mencapai Rp 20 triliun. Nominal itu mencakup seluruh sektor (*blogspot.com 2 Pebruari 2013*).

Bencana yang ditimbulkan sebagai akibat banjir merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan kerugian jiwa, harta dan benda. Kerugian akibat banjir adalah perhitungan kerusakan bangunan, kehilangan barang berharga, hingga *opportunity cost* saat semua orang tidak bisa masuk kerja dan sekolah. Banjir tidak dapat dicegah, namun hanya dapat dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang diakibatkannya. Berhubung datangnya relatif cepat, untuk mengurangi kerugian akibat bencana tersebut perlu dipersiapkan penanganan secara cepat dan tepat.

Pembangunan lingkungan pemukiman umumnya akan menghindari kawasan yang rentan terhadap banjir. Sejalan dengan

pertumbuhan kota dan permasalahan lahan, kawasan perumahan baru dan pusat-pusat kegiatan komersial berkembang dan meluas ke arah wilayah yang rentan banjir yang sebelumnya dihindari. Selain itu, kebutuhan lahan yang meningkat tajam, tentunya mempengaruhi harga lahan di perkotaan, seperti halnya wilayah Jakarta. Bagi masyarakat yang mampu, hal ini bukanlah sebuah permasalahan pelik, namun masyarakat kota tidak hanya terdiri dengan masyarakat berpenghasilan menengah keatas (*the have*) saja, melainkan juga terdapat kaum-kaum miskin (*the have not*) yang juga butuh tempat tinggal.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah untuk bertempat tinggal mempunyai area tersendiri, dimana area tersebut mempunyai nilai lahan yang terjangkau namun tentunya dengan fasilitas dan kondisi yang seadanya bahkan cenderung 'buruk' yang sering disebut sebagai kawasan kumuh. Kawasan kumuh ini memiliki permasalahan terhadap kondisi sosial ekonomi yang rendah dan degradasi lingkungan. Keadaan lingkungan yang buruk mengakibatkan suatu kawasan rawan akan bahaya dan bencana, terutama yang bermukim di bantaran sungai yaitu masalah banjir, resiko kebakaran dan penyakit endemik. Persoalan bencana banjir ini perlu penanganan khusus dan harus lebih diperhatikan oleh pemerintah melalui jajaran birokrasi terkait dengan mencari solusi penanganannya melalui penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan tepat.

Tuntutan penanganan dan pelayanan yang memuaskan oleh

masyarakat kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai penanggulangan banjir ini ditanggapi dengan mengedepankan kebijakan strategis dengan dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 250 Tahun 2014, sebagai perubahan dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. Realitas yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa penanggulangan bencana banjir belum terselenggara dengan baik, karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satuan Tugas Perangkat Daerah (SKPD). Oleh sebab itu harapan warga Jakarta untuk hidup bebas dari bencana banjir tampaknya 'masih jauh panggang dari api'. Masalah klasik ibu kota negara ini tak kunjung terpecahkan, meski pemerintahan DKI Jakarta telah membentuk unit organisasi dalam menanggulangi bencana, bahkan frekuensi dan luasan daerah yang terkena dampak banjir cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Prinsip dari penanggulangan bencana menurut peraturan gubernur meliputi: a) cepat dan tepat; b) prioritas; c) koordinasi dan keterpaduan; d) berdaya guna

dan berhasil guna; e) transparansi dan akuntabilitas; f) kemitraan; g) pemberdayaan; h) nondiskriminatif; i) nonproletisi. Ruang lingkup penanggulangan bencana terdiri dari pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Sebagaimana diketahui bahwa banjir memang merupakan fenomena alam yang melanda negara mana pun di dunia. Akan tetapi yang membedakan bangsa kita dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju adalah sikap yang ditampilkan untuk mencontoh dan belajar dari pengalaman, dan tidak pernah tuntas dalam menyelesaikan masalah banjir. Selama ini upaya penganganannya yang dilakukan masih bersifat parsial, terpilah-pilah, dan bersifat *top-down*. Padahal, banjir yang terjadi di Jakarta merupakan permasalahan yang kompleks, dan tidak hanya hanya terkait dengan aspek teknis, melainkan juga nonteknis.

Sebenarnya akar masalah banjir yang terjadi di suatu kawasan, bila masukan air yang berasal dari hujan di kawasan tersebut ditambah dengan air hujan yang berasal dari kawasan hulu, jumlahnya lebih besar ketimbang yang dapat teralirkan ke laut dan yang terserap ke dalam tanah pada periode waktu tertentu. Oleh sebab itu tidak dapat dipungkiri bahwa, bencana banjir besar yang melanda Jakarta terjadi manakala hujan lebat turun di wilayah Bogor bersamaan dengan hujan deras di Jakarta dan pasang tertinggi di laut Teluk Jakarta.

Penyebab banjir biasanya dikarenakan adanya curah hujan yang tinggi, permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan permukaan laut, pemukiman yang membangun

pada dataran sepanjang sungai atau kali, adanya sampah sehingga aliran sungai tidak lancar. Saat seka rang ini masyarakat sudah tidak peduli lagi terhadap lingkungan hidup tempat mereka tinggal, yang terlihat dari semakin sedikitnya masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Demikian pula, banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan juga menggundulkan hutan. Merusak lingkungan atau mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan dapat menyebabkan terjadinya banjir.

Berdasarkan kondisi dan keadaan di lingkungan tersebut seharusnya kelestarian lingkungan itu sangat penting. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungaialami, meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauhdari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekatair untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Manusia terus menetap diwilayah rawan banjir adalah bukti bahwa nilai menetap dekat air lebih besar dari pada biaya kerusakan akibat banjir periodik.

Kelurahan Pondok Pinang adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Kelurahan ini memiliki jumlah penduduk sekitar 60.000 jiwa dan mempunyai luas wilayah sebesar 687 Ha. Kelurahan ini merupakan salah satu wilayah yang sering ditimpa musibah banjir dari tahun ke tahun,

terutama bagi masyarakat yang tinggal di bantaran Kali Pasangrahan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pondok Pinang ?
2. Faktor-faktor dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pondok Pinang?
3. Strategi untuk mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pondok Pinang?

## KAJIAN PUSTAKA

Penelitian tentang implementasi kebijakan telah banyak dilakukan, tetapi dengan cara pandang yang beragam. Namun penelitian tentang penanggulangan bencana alam belum banyak dilakukan. Dari hasil penelusuran kepustakaan ditemukan beberapa peneliti terdahulu yang penulisannya relevan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Ujang Misron (2014) tentang strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Upaya pencegahan dan penanggulangan bencana telah dilakukan berbagai pihak, mulai Pemerintah Pemerintah Daerah Propinsi Lampung (Satkorlak PB), Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Satlak PB), kecamatan, sampai tingkat yang paling bawah yaitu Kelurahan/Pekon (desa) dan masyarakat. Kajian bertujuan untuk mengetahui kelembagaan

penanggulangan bencana yang ada dan permasalahan penerapannya dilapangan serta menyusun alternatif strategi dalam penanganan bencana di Kabupaten Lampung Lampung Barat yang berbasis masyarakat dan peran swasta sebagai komponen utama dalam penanggulangan bencana.

Kelembagaan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Lampung Barat pada saat ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 12 tahun 2006 tentang Prosedur tetap (PROTAP) satuan pelaksanaan penanggulangan bencana masih didominasi oleh aparat pemerintah saja sedangkan keterlibatan masyarakat dan swasta masih sedikit sekali sehingga pada setiap terjadi bencana selalu menemui kendala dalam penanggulangannya, Kendala yang ditemui antara lain masih lemahnya koordinasi antar pihak yang terlibat dalam satlak PB dan belum memberikan dengan jelas tugas pokok dan fungsi antar instansi dan pada setiap tingkatan pemerintahan serta belum melibatkan pihak swasta dan masyarakat secara optimal.

Empat strategi yang diusulkan melalui kajian ini adalah: (1) Upaya penyempurnaan dokumen Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana (2) Pengembangan pengadaan pos anggaran penanganan bencana mulai dari tahap mitigasi, tanggap darurat hingga pasca bencana (3) Pengembangan keterlibatan masyarakat dalam penanganan bencana. (4) Pengelolaan partisipasi pihak swasta dalam penanganan bencana di Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian yang dilakukan Yadrison (2014) tentang implementasi fungsi program penanggulangan bencana

pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi fungsi Program Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat; dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, teknik wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan dengan 4 informan dari unsur pemerintah serta 10 informan dari unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat lokal yang dianggap mewakili masyarakat Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penelitian.

Implementasi fungsi program penanggulangan bencana sebelum terjadi bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat. meliputi penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi-instansi pemerintah serta stakeholders yang terkait dalam implementasi program penanggulangan bencana. Kegiatan yang dilakukan antara lain membuat peta daerah-daerah rawan bencana dan menginformasikannya kepada pihak-pihak terkait; menyusun potensi Linmas dan Satgas PBP; menetapkan daerah-daerah alternatif pengungsian; menyusun program PBP; mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan; Geladi Posko dan Geladi Lapangan PBP; menyusun Prosedur Tetap Protap) PBP;

dan menetapkan anggaran PBP dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi fungsi program penanggulangan bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan kebijakan BAKORNAS PBP, dan secara prinsip sudah selaras dengan teori manajemen risiko sebagaimana yang disekripsikan oleh *Asian Disaster Preparedness Center*, namun secara teknis masih menunjukan kelemahan-kelemahan yaitu; kebijakan penanggulangan bencana tidak tersosialisasi secara efektif kepada masyarakat di daerah-daerah rawan bencana; tidak ada penggalangan secara khusus sumber daya masyarakat di lokasi-lokasi bencana atau rawan bencana; pemberian bantuan sangat terlambat, jumlah bantuan tidak mencukupi, dan kontribusi Pemerintah Provinsi lebih kecil bila dibanding dengan kontribusi Pemerintah Kabupaten; penggalangan peran serta masyarakat di lokasi-lokasi bencana/ rawan bencana dari pemerintah Provinsi/Badan Kesbang Linmas tidak ada.

Memperhatikan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas, berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya lebih menekankan pada kebijakan atau program yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Provinsi/ Kabupaten), sedangkan penelitian ini meneliti dan mengkaji pelaksanaan penanggulangan bencana yang implementornya oleh pemerintah kelurahan. Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian ini lebih

kepada implementasi kebijakan penanggulangan bencana. *Kedua*, factor-faktor dalam penanganan bencana yang digunakan oleh peneliti sebelumnya lebih menunjukkan peran factor-faktor eksternal dalam penanganan bencana. Sedangkan factor-faktor yang digunakan penulis dalam penelitian ini, menggunakan teori Jones tentang Implementasi kebijakan yang mengedepankan aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi, dengan maksud bahwa bobot implementasi kebijakan ditentukan oleh factor-faktor internal dan eksternal, bukan eksternal saja atau internal saja. Hal tersebut menjadi substansi mendasar yang dapat membedakan antara penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah dikemukakan.

### Kebijakan Publik

Birokrasi Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan ataupun keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak, inilah yang disebut sebagai kebijakan publik. Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan banyak kebijakan yang harus diambil, baik itu secara nasional, regional maupun lokal, sebagai suatu upaya untuk mengatur tatanan kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat

Pemahaman tentang kebijakan publik berasal dari terjemahan *public policy*, sebagaimana menurut Islamy, (2004:17) yang menerjemahkan kata *public* ke dalam bahasa Indonesia sangat susah misalnya diartikan masyarakat, rakyat, umum dan negara. Namun kebanyakan penulis buku menerjemahkannya sebagai “publik” saja seperti terjemahan *Public Policy*

yaitu kebijakan publik. Kata *public* mempunyai dimensi arti yang agak banyak, secara sosiologi kita tidak boleh menyamakannya dengan masyarakat. Perbedaan pengertiannya adalah masyarakat di artikan sebagai sistem antar hubungan sosial dimana manusia hidup dan tinggal bersama-sama.

Terdapat norma-norma atau nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat tertentu yang mengikat dan membatasi kehidupan anggota-anggotanya. Dilain pihak publik diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama. Tidak ada norma/nilai yang mengikat/membatasi perilaku *public* sebagaimana halnya pada masyarakat, karena *public* sulit dikenali sifat-sifat kepribadiannya (identifikasi) secara jelas. (Islamy, 2004:16).

Sementara kebijakan yang dimaksud disepadankan dengan kata *policy* yang dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Winarno, (2011:16) dan Wahab, (2012:1-2) sepakat bahwa istilah 'kebijakan' ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*. Bagi para *policy makers* (pembuat kebijakan) dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang di luar struktur pengambilan kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan. Charles O. Jones (1996) mengemukakan bahwa *implementation is the set of activities directed toward putting a*

*program into effect*. Dengan demikian maka implementasi merupakan serangkaian beberapa aktivitas dan kegiatan guna melaksanakan sebuah program untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Menurut Jones implementasi kebijakan terdiri dari 3 (tiga) aktivitas utama yaitu *organization*, *interpretation*, dan *application*. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi pelaksana kebijakan, Interpretasi dalam hal ini adalah interpretasi para pelaksana kebijakan, aplikasi dalam hal ini adalah penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan dengan tujuan kebijakan public yang telah di tentukan.

#### **METODE PENELITIAN**

Suatu penelitian ilmiah membutuhkan desain sebagai tuntutan dalam mencari informasi, pengumpulan data dan observasi yang kemudian dianalisis. Menurut Nazir (2011:88), bahwa “desain dari suatu penelitian adalah proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”.

Sementara Ndraha, (1985:88) menambahkan bahwa “merupakan kombinasi antara tujuan penelitian dengan unsur-unsur dari penelitian itu sendiri. Untuk itu, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif”. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Teknik analisis data dilakukan analisis SWOT dan reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Pondok Pinang merupakan salah satu wilayah Kelurahan dalam wilayah Pemerintah Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang memiliki luas  $\pm$  684 Ha. Adapun kondisi lingkungan hidup pemukiman penduduk di Kelurahan Pondok Pinang terdiri dari lingkungan pemukiman warga yang teratur/tertib seperti pemukiman Pondok Indah seluas  $\pm$  400 Ha, dengan bentuk Real Estate (RW. 013, 014, 015, 016, 017, dan sebagian RW. 03). Cagar budaya pengrajin kayu Pondok Pinang seluas  $\pm$  60 Ha (RW. 01, 02, sebagian RW. 05, 06, 011) dan perumahan kompleks POLRI serta Departemen Pekerjaan Umum seluas  $\pm$  50 Ha, sedangkan sisanya dihuni oleh warga masyarakat yang berpenghasilan sedang.

Keadaan Sosial Ekonomi masyarakat Kelurahan Pondok Pinang yang secara bertahap bergeser dari pola pikir tradisional ke arah yang lebih modern, sehingga cara usaha selaku pengrajin kayu ikut berubah. Hal ini terlihat dari meningkatnya usaha yang dilakukan masyarakat yang beralih ke sektor jasa dan perdagangan, walaupun masih banyak juga masyarakat yang masih menjadi pengrajin kayu sehingga cagar budaya pengrajin kayu tetap terjaga.

Birokrasi pemerintahan Kelurahan Pondok Pinang sebagai sebuah organisasi publik, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Kepala Kelurahan selaku perangkat daerah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelurahan dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 147 Tahun

2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan. Sejalan dengan hal tersebut, maka kelurahan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Gubernur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan daerah di wilayah kelurahan.

Guna menyelenggarakan tugas sebagaimana disebutkan di atas maka Kelurahan Pondok Pinang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan, dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kelurahan;
- b. Pelaksanaan tugas pemerintahan daerah yang dilimpahkan dari Gubernur;
- c. Pengendalian operasional pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur oleh Satuan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- e. Pembinaan lembaga masyarakat;
- f. Pembinaan prasarana dan sarana umum, termasuk saluran-saluran air lingkungan serta saluran tersier lainnya;
- g. Pemeliharaan dan pengembangan kebersihan dan lingkungan hidup;
- h. Pemeliharaan dan pengembangan kesehatan lingkungan dan komunitas;
- i. Pengoordinasian puskesmas kelurahan
- j. Pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan;
- k. Perawatan tanah interaktif dan pengawasan pohon di jalan;

- l. Pembinaan Rukun Warga dan Rukung Tetangga;
- m. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga musyawarah kelurahan;
- n. Pelayanan kepada masyarakat (pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan dari Gubernur);
- o. Pengendalian pelaksanaan anggaran Satuan Tugas Pilisip Pamong Paraja Kelurahan;
- p. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
- q. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan kelurahan; dan
- r. Pelaporan, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi Kelurahan Pondok Pinang dibentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2009, dengan menggunakan pola maksimal yang terdiri dari:

- a. Lurah
- b. Sekretariat Kelurahan
- c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban
- d. Seksi Perekonomian
- e. Seksi Prasarana dan Sarana
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- g. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
- h. Seksi Pelayanan Umum; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Pondok Pinang**

Birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan sangat berperan dalam

menentukan keefektifan kebijakan. Birokrasi tersebut mencakup aspek struktur organisasi, pembagian urusan pemerintahan, dan koordinasi yaitu hubungan antar unit dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan dengan organisasi luar. Birokrasi ini penting supaya tidak terjadi duplikasi, dan petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasi kerja yang dibuat sehingga tidak menyulitkan aparat pelaksana dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh sebab itu, lahirnya kebijakan pemerintah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehingga fungsi pemerintah sebagai pelayan yang membuahkan keadilan, fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran masyarakat.

Menyikapi hal dimaksud, salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya tanggap terhadap bencana yang terjadi sebagai bentuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, maka dikeluarkan kebijakan tentang penanggulangan bencana yaitu melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. Lahirnya kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelenggarakan kesiapsiagaan dalam pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi melalui pengkoordinasian serta langkah-langkah yang tepat guna dan berhasil guna. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana, dimana kewenangannya diserahkan pada Badan Penanggulangan Bencana daerah

(BPBD) sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Menyikapi pentingnya organisasi BPBD, berkaitan erat dengan eksistensi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, karena keberadaannya didukung dengan Peraturan Gubernur, sehingga jelas mempengaruhi kapasitas daerah dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi di DKI Jakarta. Dengan demikian jika kegiatan penanggulangan bencana tidak diatur dengan baik, niscaya akan menghambat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Mengingat proses penanganan bencana khususnya banjir yang sering melanda sebagian wilayah DKI Jakarta, seperti halnya di wilayah Kelurahan Pondok Pinang, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait demi menyukseskan kebijakan tersebut ketika diimplementasikan.

Padaprinsipnya kebijakan yang telah dibuat bukan sekedar untuk dijadikan rencana, tetapi perlu diimplementasikan agar dapat memberikan dampak perubahan-perubahan sesuai dengan tujuan kebijakan. Sebuah kebijakan yang diimplementasikan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu, (Sunggono, 1994:137). Untuk itu, agar implementasi kebijakan itu dapat berhasil sesuai tujuannya, maka peran unsur pendukung seperti sumber daya, dan organisasi sangat penting.

Efektif tidaknya suatu kebijakan dalam implementasinya karena adanya berbagai faktor yang kerap kali melingkupi kebijakan tersebut dalam implementasinya baik secara implisit maupun eksplisit.

Implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pondok Pinang, yang diselenggarakan oleh BPBD sebagai pelaksana kebijakan, tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh segenap sumber daya pendukung kebijakan dimaksud. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Lurah Pondok Pinang kepada penulis pada hari Selasa tanggal 17 November 2015, bahwa "Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sangat tergantung dari segenap sumber daya yang mendukung, termasuk di dalamnya aparat pelaksana (staf), fasilitas sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang tersedia dalam organisasi".

Selain dukungan sumber daya pelaksana kebijakan dan fasilitas yang memadai, diperlukan pula adanya koordinasi dan jalinan komunikasi antara instansi pelaksana kebijakan dengan dukungan partisipasi masyarakat. Hal itu mengingat proses penanganan bencana melibatkan instansi terkait dan dukungan dari masyarakat, maka koordinasi dan komunikasi yang terbangun diantara aparat pelaksana sangat penting guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian beberapa aspek yang diperhatikan dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kelurahan Pondok Pinang yaitu dukungan sumber daya pelaksana kebijakan dari unit

organisasi terkait, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan alokasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Terkait dengan penanggulangan bencana banjir, maka BPBD sebagai instansi teknis yang menyelenggarakan penanggulangan bencana seyogyanya berpedoman pada visi dan misi organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan. Sebagai organisasi publik, maka dengan sendirinya BPBD melaksanakan fungsi guna merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh. Oleh sebab itu segenap kekuatan internal yang dimiliki yakni berupa sumber daya aparatur, sarana dan prasarana harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Sebuah kebijakan tidak akan memiliki makna apabila tidak diimplementasikan, untuk itu perlunya implementor kebijakan yang terlibat secara langsung dalam implementasi kebijakan tersebut. Aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir berhubungan dengan organisasi BPBD dan segenap unsur terkait yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Oleh sebab itu sebelum kebijakan itu diterapkan sedini mungkin telah ditetapkan siapa saja yang melaksanakan kebijakan itu, organisasi mana saja yang terlibat dan data siapa saja kelompok-kelompok sasaran penerima kebijakan itu.

Sesuatu hal yang sangat determinan dalam implementasi kebijakan

adalah kesiapan pelaksana kebijakan yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan itu, baik kemampuan teknis, manajerial dan kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengintegrasikan setiap keputusan, maupun dukungan yang datang dari lembaga politik dan masyarakat. Oleh sebab itu implementor kebijakan sangat berperan dalam upaya tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Sebagaimana Menurut Jones (1996:293), bahwa “implementasi itu merupakan sebuah penerapan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan program”.

Keberadaan sumber daya aparat pelaksana bukan hanya pada tahap mengoperasikan kebijakan, namun pada tahap memberikan pemahaman kepada kelompok sasaran untuk mampu mengetahui dan memahami dampak yang ditimbulkan jika kebijakan tersebut tidak dipatuhi. Aplikasi atau penerapan dalam sebuah proses implementasi kebijakan, erat kaitannya dengan kegiatan lain yaitu kegiatan organisasi dan interpretasi. Hal itu karena aplikasi merupakan sebuah proses dinamis yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan lainnya dalam kemanusiaan yang mana seseorang melakukan pekerjaannya. Artinya bahwa implementor kebijakan yang disertai tugas dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan publik, seperti halnya kegiatan penanggulangan bencana banjir, maka implementor kebijakan wajib melaksanakan kebijakan itu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Fenomena yang sering muncul dalam suatu kebijakan publik

adalah terkadang sangat baik dalam perumusannya, namun dalam penerapan atau aplikasinya di lapangan memiliki kecenderungan tidak berlangsung sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal itu karena masalah-nasalah yang sering muncul dilapangan terkadang tidak dibahas atau tidak cantumkan dalam kebijakan yang telah dirumuskan. Sebagaimana dalam pandangan Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Nugroho (2012:501) bahwa “implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan”. Pendapat itu mengindikasikan bahwa suatu kebijakan yang telah diimplementasikan seperti halnya penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana banjir, selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi.

Faktor aplikasi dalam penelitian ini pada dasarnya diarahkan untuk menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana banjir secara terencana, terpadu dan menyeluruh, agar sadar meningkatkan kualitas penanggulangan bencana banjir dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. Pada kondisi demikian, kedudukan organisasi BPBD merupakan fasilitator dalam mewujudkan setiap kebijakan dengan mengutamakan langkah-langkah dengan mengajak unsure terkait dan masyarakat untuk berpartisipasi, sekaligus memberikan mendorong kepada masyarakat untuk tanggap terhadap bencana yang terjadi. Aspek penerapan dalam proses implementasi kebijakan merupakan salah satu faktor penting untuk dapat

mewujudkan Kelurahan Pondok Pinang yang tanggap dan berdaya terhadap bencana banjir, namun hal tersebut belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Koramil Kebayoran Lama kepada penulis, sebagai berikut:

Sebenarnya sebagian besar masyarakat tahu kalau ada organisasi yang menangani bencana, terutama bagi masyarakat yang berada pada wilayah yang rawan bencana, tetapi masyarakat merasa masih kurangnya sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Masyarakat pada umumnya berharap adanya sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan, sehingga masyarakat menjadi tahu dan tanggap terhadap bencana yang terjadi, akan tetapi karena pemerintah melalui instansi teknis belum tegas dan serius dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Hasil analisis SWOT implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pondok Pinang ditunjukkan tabel 1.

Hasil dan pembahasan penelitian tersebut apabila dikaitkan dengan model dari Jones yaitu *organization*, *interpretation*, dan *application*. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi pelaksana kebijakan yang di dalamnya terdapat sumber daya aparatur yang ada dalam implementasi kebijakannya, Interpretasi dalam hal ini adalah interpretasi para pelaksana kebijakan baik itu sumberdaya internal dan eksternal organisasi, aplikasi dalam hal ini adalah bagaimana penerapan oleh para pelaksana kebijakan tersebut yang mencakup partisipasi masyarakat, sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan

yang diberikan. Dengan demikian teori dan konsep dari Charles O. John yang terdiri dari 3 (tiga) model tersebut dapat menjawab permasalahan yang terjadi di kelurahan pondok pinang melalui keterkaitan antar variable yang diteliti dengan memperhatikan isu-isu strategis yang ada di dalam organisasi (internal) maupun di luar organisasi (eksternal), sehingga implementasi kebijakan penanggulangan banjir yang telah di atur dapat berjalan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dari organisasi perangkat daerah di Provnsi DKI Jakarta. Kerangka model tersebut akan berjalan dengan baik jika seluruh stakeholder terkait berkomitmen dan mengerti akan tugas dan fungsinya masing-masing dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir khususnya di kelurahan pondok pinang dan umunya di provinsi DKI Jakarta.

**Tabel 1** SKOR Litmus Test Alternatif Isu Strategis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir

No	Alternatif Strategi	Perhitungan Skor		SKOR
		SKOR	Pembagi	Litmus Test
1	Memaksimalkan penggunaan sumber daya aparatur dan anggaran yang tersedia dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir guna memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.	29	12	2,42
2	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan melalui sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan.	27	12	2,25

Sumber: Hasil Analisis

**Tabel 2** Hasil Uji *Litmus Test* dan Tingkat Kestrategisan Isu-Isu Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir

No	ISU STRATEGIS	SKOR RATA-RATA	TINGKAT PRIORITAS
1	Memaksimalkan penggunaan sumber daya aparatur dan anggaran yang tersedia dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir guna memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.	2,42	Pertama (Sangat Strategis)
2	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan melalui sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan.	2,25	Kedua (Strategis)

Sumber: Hasil Analisis

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir yang diselenggarakan oleh BPBD sebagai implementor kebijakan dengan melibatkan instansi sektoral di Kelurahan Pondok Pinang belum terlaksana secara optimal, walaupun di Kelurahan Pondok Pinang telah ada Kampung Siaga Bencana dan ada Piket Siaga Banjir. Hal itu disebabkan karena kurangnya koordinasi yang dilakukan dengan segenap komponen yang terlibat, di samping kurangnya pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga kegiatan penanggulangan banjir di Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama belum terselenggara secara efektif dan efisien.
2. Belum tercapainya implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pondok Pinang, membentuk mata rantai kebijakan yang disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. Faktor organisasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir belum dilaksanakan secara terencana, terpadu dan menyeluruh, oleh para pelaksana kebijakan terutama pada sisi kapasitas dan kapabilitas terkait dengan tingkat kompetensi seperti keahlian yang dimiliki, tingkat kreativitas dan komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga kegiatan belum terselenggara secara optimal. Di sisi lain, organisasi BPBD belum konsisten dalam membangun hubungan kerja yang harmonis di antara sesama aparat, dengan instansi terkait, maupun dengan masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan bencana banjir daerah secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, sehingga hasil yang dicapai belum optimal.
  - b. Faktor interpretasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir belum terselenggara secara optimal. Hal itu disebabkan karena kurangnya kejelasan dan pemahaman yang menyeluruh terhadap makna dan hakikat kebijakan yang diimplementasikan. Kondisi tersebut berdampak pada terjadi kekeliruan dalam memahami dan memaknai esensi kebijakan, dari implementor kebijakan maupun segenap komponen baik unsur pengarah maupun pelaksana yang terlibat di dalam proses implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir, sehingga pelaksanaan kebijakan belum mencapai hasil secara optimal.
  - c. Faktor penerapan atau aplikasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana, belum diterapkan dengan baik karena kurangnya dukungan sumber daya organisasi BPBD dan unsur terkait yang

menyangkut dengan aspek teknis dalam penanganan bencana banjir. Hal itu ditunjukkan dengan kurangnya kemampuan memahami cara kerja, penggunaan metode dan prosedur pelaksanaan kegiatan, kemampuan bekerja secara efektif, serta kemampuan melihat organisasi secara keseluruhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama belum terselenggara secara optimal.

3. Strategi yang tepat untuk mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pondok Pinang guna memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu:
  - a. Memaksimalkan penggunaan sumber daya aparatur dan anggaran yang tersedia dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir guna memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
  - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan melalui sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Alwasilah, A Chaedar, 2003. *Pokoknya Kualitatif*, Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya dan Pusat Studi Sunda.

Amien. A. Mappadjantji, 2005. *Kemandirian Lokal. Konsep Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari perspektif Sains Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Amirin, M. Tatang, 2000. *Menyusun Rencana Penelitian*, Edisi 1, Cetakan Keempat,. Penerbit. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, : Rineka Cipta, Jakarta.

Bryson Jhon, 2007, *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Sosial*, Diterjemahkan oleh Miftahudin, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Bungin, Burhan, 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Creswell W. John. 2003. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif)*. Alihbahasa: Nur Khabibah.: KIK Press, Jakarta.

Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Edwards III, George, C.1980. *Implementing Public Policy*, Wasihington D.C: Congressional Quarterly Press.

Effendy, Khasan, 2010, *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*, CV. Indra Prahasta, Bandung.

Fukuyama, Francis. 2005. *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Terjemahan A. Zaim Rofiqi. Jakarta.

Gibson, James L. John M.I, James H. Donely, 1999, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*, Jakarta, Inter Aksara

- Grindle, Merilee. S dan Thomas, John. W. 1980. *Public Choices and Policy Change*. London: The John Hopkins University Press.
- Hamdi, Muchlis, 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*, Jakarta: Yursif Watampone.
- Hoegerwerf, 1983. *Ilmu Pemerintahan* (Terjemahan), Erlangga, Jakarta.
- Howlett, Michael. and M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto: Oxford University Press.
- IDEP. 2007. *Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*, Edisi ke-2, Bali : Yayasan IDEP.
- Irawan, Prasetya, 2007; *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta
- Islamy, Irfan, M, 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*; Bina Akara, Jakarta.
- Kadji, Yulianto., 2008, *Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Realitas*, Penerbit: Cahaya Abadi, Tulungagung.
- Koswara, E, 2001. *Teori Pemerintahan Daerah*, : IIP Press, Jakarta.
- Kusmana 2007. *Analisis terhadap Aspek-aspek kepemimpinan yang mempengaruhi stabilitas dan prestasi*; Institut Keguruan dan Pendidikan, Bandung.
- Lane, Jane-Erik, 1995, *The Public Sector : Concepts, Models and Approaches*, Sage Publications, London.
- Lineberry, R.L. 1978 *American Public Policy*, New York: North Western University Harpen and Row Publisher.
- Maryono, Agus. 2010. *(Preparedness Assament tools for Indonesia)*, Jakarta : UNESCO.
- Mazmanian, Daniel A dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. New Jersey: Scott, Foresman and Company.
- Moenir, H.A.S, 2008, *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Gunung Agung, Jakarta.
- Moleong, L.J, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, Moh, 2011. *Metode Penelitian*, : Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ndraha Taliziduhu. 1985. *Desain Riset dan Teknik Penyusunan Karya Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*; Rineka Cipta Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2012. *Public Policy. Teori Kebijakan - Analisis Kebijakan - Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate - Metode Penelitian Kebijakan*: Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nurjanah dkk. 2012. *Manajemen Bencana*, Bandung: Alfabeta.
- Pressman, J. dan A. Wildavsky. 1984. *Implementation, 2nd edition*. Berkeley: University of California Press.
- Priambodo, S. Arie. 2009. *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*, Yogyakarta: Kanisius.

- Pribadi, S. Krishna dkk. 2008. *Buku Pegangan Guru: Pendidikan Siaga Bencana*. Bandung: Pusat Mitigasi Bencana – Institut Teknologi Bandung
- Rahayu, H.P, dan Wahdiny, I.I, dan Utami, A, dan Asparini, M, 2009. *Banjir dan Upaya Penanggulangannya, Program for Hydro-Meteorological Risk Mitigation Secondary Cities in Asia (PROMISE)*, Bandung.
- Rakhmat. Jalaluddin. 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. : Pustaka. Arif. Jakarta.
- Rangakuti, Freddy. 2009. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*;: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rasyid, M. Ryaas, 2007. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, : PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*. Edisi Ketiga. Terjemahan Jusuf Udaya Lic.: Arcan, Jakarta.
- Saefullah, A. Djadja. 2009. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*. Bandung: LP3AN FISIP UNPAD.
- Salusu, 2006, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, Grasindo, Jakarta.
- Santoso. Slamet Sudi. 2010. *Pasi perangkat diagnose siap siaga. Unesco office Jakarta*.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soegoto, Eddy Suryanto, 2008. *Marketing Research The Smart Way To Solve A Problem*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*;: Cetakan ke 17. CV Alfabeta, Bandung.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafri, Wirman, 2010, *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*, Alqa Print, Bandung.
- Taylor, and Bogdan, 1975, *Community Theories*, London: Oxford University Press.
- Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, Cetakan VII*. Jakarta.: Rajagrafindo Persada.
- Udoji, Chief. J. O. 1981. *The African Public Policy in Africa*. Addis Ababa: African Association and Management.
- Wahab, Solichin Abdul, 2012. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*;: PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu., 2003, *Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan Daerah*, CV. Fokusmedia, Bandung.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*.: Intermedia, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses (Edisi Revisi)*.: Media Pressindo, Yogyakarta.